

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Semawung mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi PKH belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuan dan pembiayaan. Selain itu, implementasi PKH juga dipengaruhi oleh faktor aparat pelaksana dan kelompok sasaran, dengan perincian sebagai berikut:

1. Implementasi PKH ternyata belum berjalan secara optimal. Hal ini diindikasikan dengan aspek pencapaian tujuan masih banyak penerima PKH yang belum memahami betul tujuan dari adanya program PKH tersebut dan untuk tingkat kemandirian penerima PKH juga masih sangat rendah. Selain itu, pada aspek pembiayaan ketepatan waktu penyaluran dana bantuan belum berjalan sesuai dengan perencanaan meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan komponen yang ada.
2. Aparat pelaksana belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan aparat pelaksana terhadap *guideline* program yang masih belum optimal, seperti masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan pedoman yang ada serta kurangnya sosialisasi oleh

aparat pelaksana kepada penerima PKH sehingga para penerima belum mengetahui dan memahami aturan dasar dari program PKH tersebut. Meskipun pada aspek tingkat pemahaman terhadap program aparat pelaksana sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, seperti pemahaman mengenai sasaran program PKH dan manfaat yang seharusnya diperoleh oleh para penerima PKH. Dengan demikian, keadaan aparat pelaksana yang seperti ini ternyata belum mendukung implementasi sehingga menjadikan implementasi PKH belum berjalan secara optimal.

3. Kelompok sasaran belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pertama, tingkat pengetahuan penerima program terhadap pemanfaatan bantuan program yang masih rendah sehingga terdapat penyalahgunaan bantuan program oleh masyarakat. Kedua, pada aspek kondisi ekonomi pelaksanaan program PKH sudah dapat dikatakan cukup baik karena pendapatan yang dimiliki penerima PKH sebagian besar di bawah rata-rata dan kondisi tempat tinggal tidak menjadi jaminan masyarakat untuk dapat menerima bantuan program. Ketiga, sikap penerima PKH terhadap program yang masih rendah, seperti tanggapan masyarakat yang masih diam saja ketika ada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan sehingga hal tersebut mengakibatkan program menjadi tidak tepat sasaran walaupun pemahaman penerima program PKH mengenai pendataan bagi masyarakat yang sudah mandiri dan belum tercantum

di DTKS sudah cukup baik. Dengan demikian, keadaan kelompok sasaran yang belum mendukung implementasi menjadikan implementasi PKH belum berjalan secara optimal.

B. Implikasi

Dari kesimpulan diatas, berikut adalah implikasi yang dipaparkan peneliti sebagai referensi untuk meningkatkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo:

1. Pemahaman terhadap tujuan program belum cukup baik, maka perlu adanya pendekatan oleh pengelola terhadap penerima program agar pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Karena kepatuhan terhadap *guideline* program masih kurang optimal maka akan lebih baik apabila pedoman pelaksanaan dibuat lebih sederhana agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.
3. Karena pengetahuan terhadap pemanfaatan program masih belum optimal maka pengelola perlu melakukan kontrol kepada penerima program melalui pemantauan dan pendataan agar tidak ada lagi bantuan program yang disalahgunakan.
4. Kondisi ekonomi penerima program sudah sesuai dengan sasaran dari program ini, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Sehingga syarat

tersebut harus menjadi salah satu acuan dalam memberikan bantuan program PKH ini.

5. Dalam sikap terhadap program belum optimal maka akan lebih baik jika adanya pembaharuan data secara rutin oleh pemerintah pusat supaya program yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan serta adanya sosialisasi rutin mengenai pengaduan yang dapat dilakukan masyarakat apabila didapati kendala dalam pelaksanaan program.

